



PEREMPUAN DAN PROGRAM MICRO FINANCE (Keuangan Mikro) DI ACEH: Dampak dan Tantangan Program Pasca Tsunami Dan Konflik¹

Eka Srimulyani

Abstract

This article will examine the case of micro finance programs in Aceh post tsunami dan conflict, on how it would has impacts on the life of the [women] beneficiaries or the micro finance groups, and the challenges faced. There have been some debates; support and doubt on the effectiveness of micro finance in providing better economic access and opportunities for the beneficiaries or in reaching the poor people through the program. There have been myriad studies on the link between the micro finance program and the economical impacts for the people or the livelihood of the beneficiaries. The study showed some impacts that microfinance had on the life of women's beneficiaries, implemented in the context of post conflict and tsunami Aceh with a main argument the post conflict and tsunami had contributed particular challenges to the programs, and also has caused some peculiar impacts on women's life in post conflict and disaster context accordingly.

Key Words: *Micro finance, perempuan, Aceh, pasca conflict and tsunami.*

Pendahuluan

Provinsi Aceh yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra adalah salah satu daerah yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Gempa cukup hebat dialami daerah ini pada bulan Desember 2004 lalu. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur namun juga berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, daerah ini juga memiliki sejarah konflik yang relatif panjang. Konflik terakhir antara pemerintah pusat dan

Gerakan Aceh Merdeka berlangsung selama tiga dekade dan berakhir pada tahun 2005 ketika perjanjian damai antara kedua belah pihak yang bertikai ditanda tangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Peristiwa tsunami dahsyat yang menimpa Aceh kemudian seperti menjadi catalyst dalam pembicaraan damai. Fase setelah perdamaian kemudian dikenal dengan istilah “rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca konflik dan tsunami”. Secara formal, fase ini dimulai pada tahun 2005 – 2008 yang merupakan masa kerja BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Aceh Nias. Walaupun setelah tahun 2008 masih ada beberapa lembaga internasional dan lokal yang melanjutkan beberapa pekerjaan sebelumnya, namun puncak dari rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh terjadi pada tiga tahun pertama setelah tsunami (2005 – 2008).

Baik konflik maupun tsunami memiliki dampak tersendiri terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Aceh. Tsunami selain mengancurkan rumah-rumah masyarakat, juga membuat mereka kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian, perternakan, dan sebagainya juga terkena dampak kerusakan karena tsunami. Untuk wilayah konflik, persoalan “keamanan” menjadi alasan bagi mereka yang akhirnya harus meninggalkan lahan-lahan tanpa digarap untuk usaha produktif. Karena ketakutan pula, beberapa anggota masyarakat juga memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Kondisi ini secara pasti ikut berdampak pada pekerjaan atau mata pencaharian mereka, seperti harus mencari dan beradaptasi dengan jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang baru.

Semua latar belakang di atas menjadikan ekonomi sebagai salah satu persoalan serius yang terjadi di Aceh sebagai dampak dari konflik dan bencana tsunami. Desain dari pembangunan kembali Aceh pasca konflik dan tsunami terlihat juga memberikan perhatian tersendiri terhadap persoalan ini. Walaupun dalam penilaian yang sangat umum, belum terlihat adanya hasil yang cukup signifikan dari intervensi di bidang ini. Dalam konteks ini, *microfinance* (keuangan mikro) merupakan salah satu model yang dipilih, terutama sekali kalau penerima manfaatnya adalah perempuan, atau pelaku usaha kecil menengah. Data dari BRR menunjukkan bahwa ada lebih dari seratus lembaga yang berkontribusi dalam program pemberdayaan ekonomi melalui *micro finance*. Kebanyakan memilih

atau fokus pada program pemberdayaan ekonomi dengan model keuangan mikro, dan mayoritas penerima manfaat dari program ini adalah perempuan baik individu maupun kelompok. BRR sendiri mempunyai program koperasi perempuan dan memberikan alokasi dana yang relatif banyak kepada beberapa kelompok koperasi perempuan di beberapa kabupaten.

Untuk mengimplementasikan program ini, beberapa lembaga internasional mencari partner lokal, termasuk lembaga atau NGO perempuan atau NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, dan isu-isu gender seperti Yayasan Matahari, Bungong Jeumpa, Beujroh, Flower Aceh and lain-lain. Cara yang biasanya dipakai adalah melalui pinjaman bergulir yang akan dipakai oleh penerima manfaat untuk mendukung usaha atau bisnis yang mereka jalankan atau sebagai modal awal bagi mereka yang baru saja memulai usaha.

Study ini akan lebih fokus pada penerima manfaat dalam bentuk kelompok. Pada dasarnya baik pendekatan secara individual maupun kelompok, keduanya sering dipakai dalam aktifitas keuangan mikro. Namun demikian kajian ini akan lebih fokus pada pendekatan kelompok yang mayoritas penerima manfaatnya adalah perempuan. Nama dari model kelompok seperti ini bisa bermacam-macam seperti Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Perempuan/wanita ataupun Kelompok Swadaya Masyarakat.

Walaupun menjadi salah satu model yang sering menjadi pilihan program pemberdayaan masyarakat, program ini bukan tanpa tantangan. Tantangan yang paling besar adalah mengenai persoalan keberlanjutan. Sementara itu tantangan lainnya juga muncul sebagai akibat dari sebuah konteks khusus pasca konflik dan tsunami yang melanda. Tantangan yang ada tidak hanya persoalan ekonomi semata tetapi juga terkait aspek sosial keagamaan juga. Misalnya sampai sekarang masih ada anggapan bahwa model mikro kredit atau *micro finance* tidak Islami terkait dengan jasa pinjaman yang harus dibayara, karenanya punya implikasi hukum menjadi tidak dibolehkan.

Study ini akan menganalisa program *micro finance* yang dilakukan di Aceh selama fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*). Semua ini akan diletakkan dalam konteks pasca konflik dan tsunami Aceh.

Perempuan Aceh: Antara pekerjaan dan produktivitas ekonomi

Walupun secara umum, perempuan dari bebrbagai masyarakat di dunia sudah menjadi bagian dari dunia kerja atau aktivitas ekonomi produktif (lihat Boserup, 2970), namun bagi sebagian masyarakat lainnya, persoalan budaya, tradisi terkadang membatasi peraan mereka di ruang publik termasuk di sektor ekonomi produktif. Sharif (2001: 224) menyatakan bahwa akses yang dimiliki oleh perempuan terhadap aktivitas ekonomi produktif sangat terkait erat dengan dengan mobilitas mereka di ruang publik. Salah satu yang menjadi tantang dari proyek-proyek kredit mikro di Bangladesh misalnya terkait dengan tradisi *purdah* yang membatasi gerak perempuan di luar rumah. Hal ini sama juga diungkapkan oleh Hunt (2001: 45) yang berpendapat bahwa “ Salah satu dari faktor kunci yang membatasi perempuan Bangla- desh dan India dari kontrol terhadap pinjaman dan keuntungan yang ada adalah kurangnya akses mereka ke pasar...”. Ini berimplikasi jauh kalau dikaji secara mendalam bahwa keber-hasilan dan kegagalan daro program seperti keuangan mikro jelas ditentukan oleh akses mer-eka secara luas kepada pasa di ana geliat eknomi tumbuh dnegan baik.

Dari sudut pandang ekonomi, mayoritas penduduk Aceh tinggal in lokasi pedesaan dan bekerja di sektor non-formal dalam bidang jasa, pertanian, peternakan dan sektor lainnya. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, sebagian masyarakat kemudian memasuki dunia kerja profesional seperti pegawai negeri sipil, militer/polisi dan sektor swasta. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak begitu terdikotomi terutama dalam bentuk-bentuk pekerjaan sektor non formal seperti pertanian. Perempuan terlibat dalam sektor ini bersama suami atau keluarga besarnya. Di beberapa daerah seperti Aceh Besar, perempuan memegang peran dominan dalam sektor ini. Secara tradisional, penelitian Jayawardena (1977) menyebutkan bahwa dalam masyarakat Aceh Besar terjadi polarisasi pekerjaan dalam bentuk “laki-laki mencari uang” dan “perempuan mencari beras”. Kondisi ini terjadi karena secara tradisional biasanya laki-laki pergi erantau untuk mencari nafkah di luar desanya, sementara perempuan bertanggungjawab untuk pengolah lahan yang merupakan sumber utama pencharian masyarakat, terutama di pedesaan. Tidak hanya terlibat dalam penggarapan lahan, kalau lahan diupahkan kepada orang lain, perempuan juga yang memegang

kontrol terhadap pengolahan dan hasil-hasilnya dalam kondisi di atas. Namun demikian, perubahan sosial dan modernitas menggeser polarisasi ini, ketika laki-laki memasuki dunia kerja, dan perempuan tidak memiliki pekerjaan formal, perempuan sebagai istri cenderung menjadi ibu rumah tangga. Dengan demikian polarisasi yang ada sebelumnya menjadi tidak relevan lagi seiring dengan transformasi perlahan dari masyarakat petani menjadi masyarakat semi 'in- dustri'.

Dengan fleksibilitas yang relatif mereka miliki, perempuan di Aceh tidak mendapat persoalan yang berarti terkait mobilitas mereka di luar rumah, sehingga keterlibatan mereka di sektor ekonomi produktif tidak mendapat tantangan yang berarti. Di Banda Aceh, misalnya pasar tradisional di Peunayong, mayoritas penjualnya adalah perempuan, yang biasa disebut dengan nama "nyak -nyak". Beberapa di antara mereka tersebut adalah penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi seperti *micro finance*. Begitu juga anak perempuan lepasan dari Sekolah Menengah Atas atau mereka yang masih kuliah bekerja di toko-toko sebagai pramuniaga. Pada tahun 1980an kebanyakan pramuniaga toko adalah laki-laki, saat ini kebanyakan pramuniaga toko adalah perempuan. Hal ini terjadi hampir di semua tempat di Aceh, tidak hanya di Banda Aceh.

Dari sisi socio-historis, perempuan Aceh memang memiliki posisi yang relatif tinggi dalam masyarakat atau dalam rumah tangga. Cara tinggal model *uxorilocal* misalnya memberi pengaruh atau manfaat tersendiri bagi posisi perempuan. (Hurgronje 1906, Siegel, 1969). Walaupun cara cara tinggal seperti ini sudah mengalami beberapa perubahan seiring perubahan zaman (Srimulyani, 2010), namun di beberapa sampai sekarang praktik serupa masih ditemui di beberapa daerah di Aceh. Model tinggal seperti ini paralel dengan konsep *matrifocality* (*women centered*) yang memberikan 'power' pada perempuan dalam hubungan kekerabatan dan keluarga. Kalau dalam beberapa masyarakat, perkawinan dan sistem kerabatan, pembagian kerja tradisional merugikan perempuan, dan mempengaruhi cara pencaharian nafkah seperti di daerah Nigeria perkotaan (odebode, 2004:75), hal tersebut sepertinya tidak sepenuhnya ada dalam masyarakat Aceh walaupun masyarakat Aceh adalah juga masyarakat yang patriarchy.

Namun demikian, cara pandang patriarchy bukan tidak ada dalam masyarakat Aceh. Peran dominan di ruang publik termasuk sektor ekonomi tetap didominasi oleh laki-laki. Laki-laki dalam masyarakat Aceh adalah pencari nafkah utama keluarga dan sebagai kepala keluarga. Karena konflik, beberapa kepala keluarga kemudian harus meninggalkan kampung halaman-nya karena alasan keamanan atau sebagian ada yang menjadi korban dari konflik itu sendiri, dalam kondisi ini perempuan mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga, dan secara otomatis menjadi penanggung jawab utama nafkah keluarga. Perempuan akhirnya mau tidak mau harus terlibat aktif lagi dalam sektor ekonomi produktif. Begitu juga, ketika bencana tsunami menghancurkan lahan-lahan pertanian, peternakan, perikanan dan sumber pendapatan lainnya dari masyarakat Aceh, bagi laki-laki agak sulit mencari dan memulai jenis pekerjaan baru di luar pekerjaan mereka sebelumnya, misalnya dari petani menjadi pedagang, dan sebagainya. Beberapa perempuan secara mudah kemudian terlibat dalam ekonomi produktif dengan memulai bisnis rumah tangga seperti membuat kue-kue dan jajanan lainnya. Kebanyakan dari aktifitas ekonomi mereka adalah usaha kecil meliputi pasar-pasar di lingkungan terdekat mereka. Walaupun dimulai dari usaha kecil dan rumahan, tidak jarang usaha mereka berkembang cukup baik dan berkontribusi cukup signifikan untuk kehidupan ekonomi keluarga. Di samping itu, karena adanya akses yang relatif fleksible yang dimiliki oleh perempuan tidak susah juga bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro termasuk beberapa pelatihan-pelatihan vocational skill yang mendukung usaha atau bisnis mereka. Dilihat dari sisi ini, program pemberdayaan ekonomi mikro yang menargetkan perempuan boleh dikatakan mempunyai prospek yang cukup meyakinkan, karena program ini tidak dimulai dari mengeksplorasi, atau memotivasi partisipasi perempuan di ruang publik atau sektor ekonomi produktif.

Pemberdayaan ekonomi perempuan; pendekatan micro finance

Secara jelas terlihat bahwa kebanyakan program pemberdayaan ekonomi yang menggunakan pendekatan *micro finance*, atau *micro credit*, seringkali menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat. Salah satu yang paling dijadikan referensi adalah contoh beneficiaries perempuan Grameen Bank di

Bangladesh (see Faraizi, 2011). Dalam konteks Indonesia, program nasional PNPM (Program Nasional Pembangunan Masyarakat) misalnya memiliki satu unit program yang dikenal dengan istilah SPP (simpan pinjam perempuan). Tapi di luar program PNPM itu sendiri, masih banyak program pemberdayaan ekonomi mikro lainnya yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat utama. Filosofi tradisional yang dikedepankan adalah bahwa kesejahteraan perempuan berarti juga kesejahteraan keluarga, *“Wives are not as much as concerned with their own consumption needs. Even though it sounds very much like a cliché, their prime concern lies with providing food for their families, avoiding embarrassing scenes with screaming children....”* (Lonts: 2001: 217).

Ide untuk menjadikan perempuan sebagai target utama penerima manfaat dari program seperti ini sebenarnya sejalan dengan upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, Mayoux (1998:199) beragumen bahwa *“...evidence indicate that ignoring empowerment concerns in programme design, as well as having potentially negative effects on women, may prejudice financial sustainability itself”*. Dalam tulisannya yang lain, Mayoux menggarisbawahi tiga model pemberdayaan perempuan; *“individual internal change (power within), increasing capacities (power to) and the collective mobilization of women and, where possible, of men (power over)”* (Mayoux, 2001: 248). Pikiran serupa juga tersurat jelas dalam pendapat ahli lainnya yang berkeyakinan bahwa dampak-dampak positif dari program microfinance atau micro credit seperti ini adalah peningkatan pendapatan, serta dampak non ekonomis seperti peningkatan posisi tawar dalam keluarga, termasuk pengaruhnya pada peran-peran sosial politik yang lebih luas lagi. *“In short, provision of credits believed not only to alleviate poverty, but to lead to the ‘empowerment’ of women”*. (Hunt and Kasynathan, 2001:42)

Namun demikian, ada juga nada-nada pesimis mengenai dampak program mikro kredit atau microfinance dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, terutama sekali terkait otonomi yang dimiliki oleh perempuan dalam konteks rumah tangga dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Lont mengenai *“Negotiating Female Autonomy: Women, Income and Credit in Urban Java”* mengungkapkan bahwa *“credit does not necessarily contribute to female*

autonomy, or to empowerment". Kesimpulannya ini berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukannya di Jawa, argumen yang diajukannya adalah bahwa jika pinjaman digunakan untuk keperluan yang konsumtif, yang disebutkannya sebagai "*shopping money*", tidak akan ada otonomi berarti yang akan diperoleh oleh perempuan, walaupun uang tersebut juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang produktif, Bahkan yang ada hanya penambahan beban dan tanggung jawab yang lebih pada perempuan di luar kerja-kerja domestik mereka (lihat Lont, 2001: 218). Pertanyaan apakah program pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan kredit mikro atau micro finance merupakan empowerment (*pemberdayaan*) atau beban (*pembebanan*) juga dibahas dalam banyak beberapa tulisan atau kajian yang menganalisa program pemberdayaan ekonomi seperti ini dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan. Debat ini tidak akan berakhir di sini, karena ada banyak faktor dan latar belakang yang mempengaruhi hasil maupun dampak dari program-program yang dijalankan terhadap perempuan. Manfaat dari kelompok perempuan seperti terlihat dari bahasan berikut ini.

Dampak dan Tantangan: Pembelajaran dari Lapangan

Untuk konteks Aceh, model *micro finance* masuk secara signifikan dan '*massive*' lewat kegiatan berbagai lembaga yang bekerja untuk kemanusiaan di Aceh, terutama dalam periode 2005 – 2008, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami dan konflik. Program-program tersebut kebanyakan memiliki penerima manfaat utama dari kelompok-perempuan. Pun sebagian program tersebut juga menekankan pada model intervensi melalui kelompok. Dalam beberapa hal, program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan secara bersamaan dengan program pemberdayaan masyarakat secara umum. Pada periode 2005 - 2008, beberapa perempuan di Aceh baik mereka yang berada di kota maupun di pedesaan terlibat atau menjadi peserta dari beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi yang bekerja di Aceh saat itu seperti pelatihan gender, pelatihan kepemimpinan, serta berbagai workshop terkait lainnya yang kebanyakan mendorong partisipasi perempuan di ruang publik dan mendukung peran politis perempuan di Aceh. Terkadang program ini juga

dilakukan secara lintas bidang sehingga *intersection* dengan program pemberdayaan ekonomi juga kerap terjadi.

Ini adalah juga periode ketika kebanyakan lembaga atau organisasi perempuan lokal didirikan and melaksanakan berbagai program terkait isu gender yang sering juga didukung secara pendanaan dari lembaga internasional dan nasional, atau juga pemerintah lokal set- empat. Pada tahun 2008, pemerintah Provinsi mendirikan Banda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini adalah sebuah kantor yang khusus menangani dan bertanggung jawab terhadap program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saat itu, hanya ada dua provinsi di Indonesia yaitu Aceh dan Papua yang memiliki Badan serupa di tingkat provinsi yang selevel dengan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) lainnya. Dengan segala dinamika yang terjadi ini, program micro credit dan micro finance di Aceh boleh dikatakan masuk secara masif ketika intervensi terhadap peorganisasi pemberdayaan perempuan dilakukan secara terkait isu-isu kesetaraan juga terjadi secara 'intensif'. Apa yang menjadi keuntungan adalah bahwa secara tidak langsung walaupun tidak dirancang dari awal, cross program pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan perempuan terjadi secara inheren dan paralel dalam beberapa program. Peserta dari kedua bidang tersebut terkadang adalah orang yang sama. Namun demikian ada juga program yang dari awal memang dirancang untuk terintegrasi dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan pemberdayaan untuk perempuan, seperti terkait isu pendidikan, kesetaraan kekerasan dalam rumah tangga, partisipasi dan peran politik perempuan dan sebagainya.

Dampak:

Salah satu tujuan yang paling utama dari program pemberdayaan ekonomi termasuk model micro finance adalah terciptanya kesejahteraan dari penerima manfaat untuk mendukung bisnis atau usaha mereka, atau bahkan secara tidak langsung juga untuk menyelesaikan persoalan dan kesulitan ekonomi rumah tangga. Nursiah misalnya yang merupakan salah satu anggota kelompok KSM dari Alue Buloh Dua, Simpang Ulim Aceh Timur mengatakan:

Saya merasa senang dengan adanya KSM ini, dimana saya bisa meminjam uang ke KSM ini sebesar Rp. 200.000. uang ini saya gunakan untuk membeli buah kelapa,

kemudian saya olah menjadi kelapa gongseng. Dari hasil penjualan kelapa gongseng bisa saya gunakan untuk uang jajan anak saya...

Di Kabupaten Pidie Jaya district, beberapa perempuan dari anggota KSM yang ditraining untuk membuat tahu kemudian bisa mengembangkan usaha mereka dari hanya menyentuk pasar lingkungan terdekat menjadi bisnis yang memiliki pelanggan dari luar desa mereka. Produk tahu yang mereka buat menjadi digemari dan mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat. Untuk mengantisipasi luasnya pasar, anggota kelompok ini akhirnya berinisiatif membeli sepeda motor sebagai sarana antar pesanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan mereka ketika melakukan pemesanan tahu. Ketika wawancara dilakukan pada Bulan Januari 2012, para pembuat tahu menyampaikan meningkatnya orderan tahu mereka, baik langsung maupun melalui hand phone. Namun demikian karena keterbatasan tenaga dan bahan baku tidak semua pesanan tersebut bisa dipenuhi. Dari bisnis ini, kesadaran akan gizi produk makanan juga meningkat. Susu soya kemudian menjadi salah satu minuman yang tidak asing lagi bagi keluarga-keluarga yang tinggal di daerah sekitar mereka. Setiap sore, para pembuat tahu ini menjajakan minuman susu soya di lingkungan mereka yang relatif laris dan diterima oleh masyarakat. Tidak hanya memberikan perubahan pada cara melihat makanan sehat, tapi penjualan susu soya ini juga memberikan penghasilan tambahan kepada mereka.

Dampak ekonomi lainnya dari program *micro finance* ini terjadi dalam bentuk yang berbeda. Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten yang dikenal dengan produk-produk pertaniannya baik buah-buahan maupun sayuran. Tomat adalah salah satu produk yang dihasilkan dari pertanian di daerah tersebut, namun demikian ada waktu-waktu ketika tomat menjadi over supplied, dan harga tomat turun, bahkan tomat dianggap kurang berkualitas menjadi tidak ada harga sama sekali. Ketika kelompok *micro finance* yang dikenal dengan nama KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) didirikan di daerah ini, dan bisnis mereka adalah saus tomat, maka tomat yang dihasilkan oleh termasuk yang tidak bagus kualitasnya jadi memiliki nilai jual.

Dengan demikian, walaupun *micro finance* itu adalah mikro atau bahkan kecil dalam pandangan sebagian orang, program ini sebenarnya punya dampak tersendiri dalam masyarakat. Beberapa penerima manfaat dari program ini adalah

perempuan yang terkenal dampak konflik atau bencana tsunami. Untuk yang tinggal di pedesaan, akses mereka ke Bank formal sangat terbatas karena persoalan jarak yang cukup jauh, keberadaan kelompok kemudian menjadi pengganti kehadiran Bank formal, terutama milik pemerintah.

Dampak non-ekonomis:

Walaupun dampak secara ekonomi menjadi fokus utama, namun demikian dampak non-ekonomis juga muncul dari implementasi program micro finance yang dilakukan selama ini. Data dan cerita dari lapangan menggambarkan adanya perubahan yang sedang terjadi walaupun tidak dalam tempo cepat yang merupakan dampak non-ekonomis dari implementasi program tersebut.

1. Soli-caritas sosial dan kepercayaan diri

Melalui program micro finance yang berbasis kelompok, solidaritas sosial antar anggota menjadi lebih kuat. Beberapa anggota dari kelompok yang selama ini menghindari keterlibatan mereka di kegiatan rapat-rapat, melalui KSM menjadi peserta rapat rutin bulanan. Aspek lain yang paling sering disebut oleh penerima manfaat sebagai salah satu dampak dari program ini adalah muncul dan tumbuhnya rasa percaya diri pada mereka. Salah seorang anggota KSM dari kecamatan Atu Lintang Aceh Tengah mengakui adanya beberapa perubahan yang terjadi pada dirinya setelah bergabung dengan kelompok: "Saya tidak menyangka ikut pelatihan di KSM [kelompok swadaya masyarakat] ini harus berdiri di depan untuk memperkenalkan diri, saya pikir kalau ikut pelatihan cuman hanya duduk dan dengar, saya tidak pernah berbicara di depan orang banyak, tapi dengan adanya KSM [kelompok swadaya masyarakat] saya sudah berani berbicara ...dan saya merasa sudah percaya diri...(Suryati, Ibu rumah tangga, 50 tahun)

Solidaritas sosial dan rasa percaya diri seperti ini merupakan salah satu karakter yang perlu dibangun dalam konteks masyarakat pasca konflik. Dalam masyarakat yang baru selesai dari konflik panjang seperti di Aceh, persoalan ketidakpercayaan antar masyarakat cukup tinggi, rasa saling tidak percaya ini kemudian menurunkan kohesi dan solidaritas sosial di antar sesama ke titik yang mengkhawatirkan. Pembentukan kelompok seperti melalui KSM diyakini sebagai salah satu solusi untuk permasalahan ini. Kemampuan untuk menyampaikan

pendapat dengan cara percaya diri dan dengan skill public speaking yang bagus kemudian akan membuat mereka mampu mengungkapkan ide, pemikiran dan membuat mereka mampu mendapatkan kembali hak-hak mereka.

2. Peran publik dan kepemimpinan

Dari adanya solidaritas sosial dan rasa percaya diri, beberapa di antara mereka kemudian mengambil peran-peran publik dalam masyarakat. Salah seorang pimpinan KSM dari Aceh Tengah misalnya kemudian terpilih menjadi kepala desa. Terlepas apakah ini ada kaitannya dengan program micro finance atau tidak, fakta bahwa yang bersangkutan adalah ketua KSM lebih dulu sebelum terpilih menjadi kepala desa mengindikasikan ada hubungan kausalitas yang mungkin saja terjadi. Apalagi jika dicermati bahwa program *micro finance* yang dilakukan melakukan beberapa program pemberdayaan seperti training kepemimpinan, manajemen, skill keorganisasian dan lain-lain. Tidak hanya itu, ketika anggota kelompok solid, maka mereka adalah bagian penting dari kepemimpinan masyarakat. Salah seorang ketua KSM di Abda diundang oleh DPRK setempat ketika sebagai kelompok mereka berhasil memproduksi sebuah produk loka yang layak juga, padahal sebelumnya sangat sulit bagi mereka untuk meminta audiensi kepada DPRK.

3. Kesadaran dan kemampuan berorganisasi

Melalui pertemuan-pertemuan yang reguler, berbagai isu dibahas dalam pertemuan tersebut. Fasilitator atau pendamping program terkadang juga menyusun tema dan topik yang menjadi bahan yang didiskusikan. Dari kegiatan seperti ini, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dan persoalan politik lokal setempat meningkat. Setelah mendapat kampanye anti korupsi, salah satu KSM di Bireun untuk mensosialisasikan keucik di desa mereka karena kasus korupsi, ketika berkelompok mereka memiliki keberanian untuk melakukan aksi. Baik melalui training maupun pertemuan reguler, para anggota kelompok belajar skill berorganisasi, kondisi ini tidak muda terutama mengingat sebagian besar dari anggota KSM adalah mereka yang memiliki pendidikan relatif rendah, di antara mereka ada yang tidak bisa baca tulis. Bariah (60 tahun), seorang janda yang menjadi anggota KSM di Peureulak barat Aceh Timur mengatakan bahwa: " Saya sudah tua tidak pernah memegang pulpen, tetapi dengan adanya rapat bulanan KSM,

membiasakan saya untuk memegang pul- pen kembali, dimana saya harus mengisi daftar hadir dan menandatangani semua surat sim- pan pinjam...”

4. Otonomi dan perubahan pola pikir

Pada tahun 2008, penulis melakukan wawancara dengan beberapa KSM di tiga kabupaten di Aceh yaitu Aceh Jaya Aceh Barat dan Aceh Besar. Data dari wawancara ini memperlihatkan adanya otonomi dalam rumah tangga yang kemudian dimiliki oleh perempuan penerima manfaat dari program microfinance sebagai dampak dari perubahan ekonomi yang terjadi. Ketika perempuan memiliki pendapatan sendiri mereka memiliki posisi tawar dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam keluarga seperti pendidikan anak, dan lain sebagainya. Tidak hanya mempunyai posisi tawar dalam pengambilan keputusan, dengan pendapatan yang dimiliki mereka juga bisa langsung mendukung keputusan ini secara finansial. Informan lainnya menyebutkan adanya perubahan dalam relasi keluarga, khususnya dengan suami. Beberapa suami yang secara langsung melihat adanya dampak positif dari keterlibatan istri-istri mereka di program seperti *micro finance* kemudian memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan istri dalam program tersebut. Salah seorang anggota KSM dari Aceh Jaya menyatakan: “Suami saya yang sering mengingatkan saya untuk ikut rapat kelompok, dia juga bahkan membangunkan saya supaya bisa ikut rapat”. Perempuan lainnya dari Kabupaten Bireun menyatakan bahwa dia baru diajak suaminya untuk berbicara terkait uang dan pendapatan dan pengeluaran keluarga setelah bergabung dengan KSM. Sebelumnya hampir tidak pernah diajak bicara untuk hal-hal krusial seperti ini.

5. Penyembuhan dari trauma dan dampak konflik

Karena masyarakat yang diinterferensi adalah masyarakat pasca konflik dampak non- ekonomis seperti penyembuhan trauma dan dampak psikologis lainnya juga dirasakan pra anggota atau penerima manfaat dari program micro finance. Sakdiah (42 tahun), seorang janda yang suaminya dibunuh ketika konflik bergabung dengan kelompok swadaya masyarakat di Simpang Ulim Aceh Timur. Sakdiah menikmati kebersamaan bersama kelompok, pertemuan- pertemuan reguler baginya menjadi obat untuk menghilangkan trauma konflik terutama ketika suaminya dibunuh, pertemuan dengan anggota kelompoknya menjadikan kesempatan untuk refreshing dan bertukar pikiran. Saat ini Sakdia memiliki warung

kopi sederhana. Kesempatan menjadi penerima manfaat program micro finance menurutnya tidak hanya memberikan dukungan finansial melalui pinjaman, tapi juga menjadi kesempatan baginya untuk membangun rasa percaya diri dan memiliki keahlian-keahlian lainnya.

Di samping itu juga, dalam konteks masyarakat pasca konflik, tidak mudah mengorganisir orang-orang dari berbagai latar belakang, tidak jarang mereka berasal dari kelompok yang dulunya bertikai atau bermusuhan. Kalau dilihat dari sisi ini, pembentukan kelompok menjadi salah satu bentuk reintegrasi dan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang bertikai.

Secara umum boleh dikatakan bahwa dampak-dampak non-ekonomis diantaranya adalah terbukanya cara berpikir masyarakat untuk melihat manfaat dari program simpan pinjam. Dampak lainnya adalah penguatan integrasi sosial yang mengurangi potensi konflik yang pernah ada serta membangun kembali rasa saling percaya (*trust*) dalam masyarakat. Tidak hanya itu manfaat lainnya juga dirasakan dari berbagai kegiatan training baik training kepemimpinan, manajemen keorganisasian, ataupun training *lifeskill* yang diberikan kepada penerima manfaat program *micro finance*. Kaum perempuan yang terlibat dalam program ini secara tidak langsung sudah terbangun rasa percaya diri, kemampuan berbicara di depan publik serta dampak positif dalam menyelesaikan dampak trauma konflik kepada mereka.

Tantangan

Karena fase rehabilitasi dan rekonstruksi sangat singkat (2005 – 2008), kebanyakan kegiatan dan keberadaannya berakhir pada tahun 2008. Kalau lembaga tersebut mengimplemetasikan program microo finace atau micro credit, maka support untuk program juga akan berakhir seiring dengan berakhirnya masa tugas, setidaknya dalam hal pendampingan di lapangan. Program *micro finance* yang mereka lakukan tidak dimulai dari awal, tapi baru dilakukan menjelang berakhirnya masa kerja mereka di Aceh. Di samping itu, dana hibah yang diberikan juga membuat masyarakat menjadi ketergantungan, dan terus berharap bahwa bantuan ekonomi selalu dalam bentuk hibah bukan pinjaman. Kondisi ini membuat program *micro finance* yang dirancang untuk jangka waktu panjang dan

berkelanjutan dalam bentuk non-hibah menjadi sulit diimplementasikan karena adanya keengganan atau bahkan penolakan dari masyarakat yang berharap bahwa dana yang disalurkan merupakan hibah yang tidak perlu dikembalikan.

Di samping itu, kalau diamati beberapa program micro finance yang dilakukan pada masa emergency tidak memiliki *exit strategy* dan keberlanjutan program ke depan. Karena itu, ketika sebagian besar program bantuan di Aceh berakhir, tidak ada lagi support yang diberikan untuk keberlanjutan program, walaupun dukungan tersebut masih diperlukan oleh penerima manfaat dari lapangan. Oleh karena itu beberapa kelompok kemudian bubar karena sudah tidak ada lagi pendampingan. Kemampuan kelompok untuk mandiri tanpa support pendamping menjadi persoalan di berbagai tempat. Ketidakmampuan kelompok untuk bertahan dan mengarahkan diri lewat program ini masih menjadi persoalan utama dari keberlanjutan program selama ini. Hal ini menyebabkan opini masyarakat terhadap program seperti ini menjadi tidak baik karena berdasarkan pengalaman mereka, sudah ada beberapa kelompok yang bubar. Dalam kondisi seperti ini, sosialisasi untuk program micro finance yang baru tidak mendapat respon yang baik di sebagian masyarakat karena pengalaman mereka melihat nasib dari kelompok *micro finance* yang sudah-sudah.

Persoalan dan tantangan lainnya juga terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Setelah ditraining dengan beberapa ketrampilan, mereka mulai memproduksi, tapi kemudian tidak memiliki jalur distribusi dan pemasaran yang bagus. Biasanya pendamping di lapangan membantu untuk pemasaran tapi ketika sudah tidak ada lagi pendamping di lapangan beberapa usaha yang dirintis kemudian menjadi mati suri. Sepertinya memang dalam program *micro finance*, pemasaran adalah salah satu persoalan dan tidak menjadi fokus dari program tersebut (Hunt and Kasynathan, 2001:50). Program *micro finance* hanya dirancang untuk tujuan akhirnya menghasilkan produk, tidak sampai pada strategi penterasi ke pasar.

Persoalan reintegrasi dan rekonsiliasi menjadi isu lain yang terjadi dalam implementasi program *micro finance* berbasis kelompok di masyarakat pasca konflik seperti Aceh. Namun demikian ketika program berhasil, ini menjadi strategi integrasi dan rekonsiliasi bagi masyarakat atau kelompok yang sebelumnya bermusuhan.

Tantangan lainnya yang harus dihayati secara hati-hati adalah penolakan dari sebagian masyarakat yang menganggap model pinjaman yang ada dalam program tersebut adalah haram karena adanya jasa yang diambil perbulan berdasarkan besaran pinjaman. Menurut mereka jasa seperti ini dari perspektif agama masuk dalam kategori riba. Penolakan seperti ini terjadi di beberapa tempat, salah satunya di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, walaupun hal ini kemudian bisa diselesaikan, namun itu cukup menjadi kendala berarti bagi intervensi program di lapangan, pembentukan kelompok mengalami deadlock, sampai akhirnya salah seorang ulama perempuan setempat terlibat menyelesaikan masalah tersebut dan menjelaskannya dari pandangan agama. Kasus serupa juga terjadi di Aceh Timur di Kecamatan Idi Rayeuk, sampai akhirnya pendamping di lapangan (fasilitator) harus menggunakan istilah lain, yaitu istilah lokal yang bisa diterima untuk jasa dari pinjaman.

Terlepas dari adanya resistensi seperti ini, saat ini Baitul Mal Provinsi Aceh mulai mengadopsi model microfinance dalam peyaluran zakat yang mereka namakan dengan istilah "zakat produktif". Dalam Fikih Islam, ada kelompok-kelompok yang menjadi penerima zakat, dana kelompok yang pertama adalah kelompok fakir dan miskin. Dalam observasi pada bulan Januari 2012, penulis mengamati bahwa kebanyakan dari penerima manfaat dari model microfinance yang dikelola oleh Baitul Mal juga menargetkan perempuan. Beberapa di antara mereka adalah para *nyak-nyak* di pasar tradisional di Setu.

Ketika sebagian besar dari organisasi dan lembaga yang bekerja di Aceh menyelesaikan program bantuan kemanusiaan mereka, maka program pemberdayaan ekonomi yang mereka lakukan juga berakhir. Dalam kevakuman seperti ini, keberadaan program pemberdayaan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan sedakah dari masyarakat muslim menjadi penting. Lembaga baitul Mal ada mulai dari tingkat provinsi sampai gampong. Beberapa inisiatif mulai dibangun oleh berbagai lembaga keuangan Islam termasuk untuk mencari model *micro finance* Islami untuk memperkuat usaha kecil menengah (lihat Antonio, 2008), atau untuk pemberdayaan masyarakat juga (lihat Sakai, 2008). Kalau sekarang, lembaga keagamaan seperti Baitul Mal provinsi mulai

mngadopsi micro finance untuk penyaluran zakat, maka kontestatsi apakah model microfinance islami atau tidak menjadi bukan persoalan yang serius lagi.

Penutup

Program pemberdayaan ekonomi mikro di Aceh seperti kebanyakan program serupa di negara lainnya mempunyai perhatian khusus terhadap perempuan. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu-isu perempuan, gender, kesetaraan dalam konteks pasca tsunami dan konflik Aceh, program pemberdayaan seperti ini baik langsung maupun tidak langsung diikuti juga oleh program-program pemberdayaan perempuan secara umum yang menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menjadi salah satu keunggulan tersendiri dari program pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan microfinance.

Program ini secara jelas menghasilkan baik dampak ekonomis maupun non-ekonomis. Dampak ekonomis misalnya adanya peningkatan pendapatan, kemampuan untuk memulai bisnis atau usaha untuk memproduksi barang atau jasa tertentu baik melalui individu maupun kelompok. Dampak non-ekonomis terlihat dari peningkatan kemampuan individu maupun kelompok terkait skill tertentu seperti kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan lain sebagainya. Begitu juga perubahan pola pikir, kepercayaan diri, akses yang lebih baik terhadap posisi dan peran publik dalam kehidupan sosial politik masyarakat juga terjadi.

Kajian ini memperlihatkan adanya tantangan tersendiri yang muncul dalam implementasi program ini yang dilatarbelakangi oleh faktor pasca konflik dan bencana. Karena dalam perkembangan terakhir, kebanyakan program micro finance menggunakan pendekatan kelompok, dampak dari ketidakpercayaan antar sesama yang terjadi sesama konflik juga mempengaruhi pembentukan kelompok. Di samping, cara berpikir bahwa mereka adalah korban dari konflik dan bencana tsunami serta karena banyaknya dan hibah yang disalurkan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh (2005–2008) akhirnya menyuburkan ketergantungan dan menghilangkan kemandirian serta cenderung membuat program pemberdayaan ekonomi tidak memiliki prospek keberlanjutan. Tantangan lainnya terkait dengan sudut pandang keagamaan, sebagian masyarakat masih meragukan model pembiayaan *revolving fund* yang memakai jasa. Penolakan atas dasar pertimbangan

agama kerap muncul bagi mereka yang mempunyai pendapat demikian, sehingga memerlukan solusi tersendiri ketika intervensi program diimplementasikan.

Kajian ini menunjukkan bahwa konteks yang khusus dengan karakteristik tersendiri perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara seksama dalam mengembangkan strategi- strategi atau mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi seperti model micro- finance, Hunt dan Kasynathan (2001:49) berargumen bahwa *“strategies that appear to be effective in one socio-cultural context may not be transferable to other context: they always need to be tested and monitored”*. Berbagai faktor memengaruhi keefektifan implementasi program termasuk sisi-sisi sosio-kultural, ini berarti bahwa setiap negara atau daerah harus memper- timbangkan pendekatan dan strategi yang berbeda untuk program micro finance mereka.

Endnote

¹Beberapa informasi dari lapangan berasal dari kelompok-kelompok program keuangan mikro dari project by LoGICA 1 (2005–2009) dan LoGICA 2 AusAid (2010–2012). Project LoGICA 2 disub- kotrakkan ke FBA (Forum Bangun Aceh), dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LOGICA (AusAid) dan FBA. Terkait tulisan ini redaksi jurnal Takammul perlu juga menyampaikan bahwa Versi Bahasa Inggris dari tulisan ini dipublikasikan di Asian Journal of Women Studies (AJWS), namun meng- ingat substansi tulisan ini penting bagi pembelajaran terkait peningkatan perekonomian perempuan, maka disepakati untuk menerima dan menerbitkan versi Indonesia agar dapat memperluas jangkauan pembacanya (tidak terbatas pada yang bisa memahami Bahasa Inggris saja)